

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2014**

---

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2014 dan Capaian Renstra OPD 2013-2018**

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Namun sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Propinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D), hingga tahun 2014 pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang perhubungan baru berdasarkan asas otonomi atau asas desentralisasi, kedua asas yang lain yaitu asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum terlaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Perhubungan. Bahkan sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok bidang Perhubungan yang lama, sampai dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, kedua asas yaitu asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum terimplementasi dengan optimal.

Tahun 2014 kembali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 sekaligus telah dimuat dalam lampirannya berupa pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dari sisi waktu, tentu tidak memerlukan penantian lagi untuk menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan sebagai turunan dari UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana UU Pemerintahan Daerah yang terdahulu. Namun dalam pelaksanaan belum dapat langsung terimplementasi,

walaupun sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2004 telah dinyatakan dicabut, tetapi peraturan dibawahnya yang berkaitan dengan pembagian urusan, tugas pokok dan fungsi, serta kelembagaan/ organisasi di Daerah masih perlu waktu untuk menyesuaikan sehingga dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap OPD. Untuk itu diperlukan kebijakan transisi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan tidak boleh ada kokosongan hukum.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, telah disusun dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 yang telah ditetapkan pada tahun 2013 (n-1). Dalam perjalanannya telah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2014 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2014.

Pada akhir tahun 2014 sampai awal tahun 2015 telah dilaksanakan review Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta terdapat 7 (OPD) awal yang direview termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dalam dua kali pertemuan telah dihasilkan penyempurnaan indikator kinerja sehingga Renstra, RKT, IKU telah juga dilaksanakan review sebagai pedoman dalam penyusunan LAKIP Tahun 2014.

Dengan mempedomani hasil-hasil review Kemenpan dimaksud, kegiatan-kegiatan Tahun 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir tahun 2014 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan 4 (empat) sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dicapai dengan memuaskan. Adapun keempat sasaran beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Sasaran dan Indikator Hasil Review Menpan

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat
3	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)
4	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi

Prosentase penggunaan anggaran Tahun 2014, dari pagu anggaran sebesar Rp. 393.381.168.479,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 221.419.535.464,00 atau sebesar 56,29 %. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 171.961.633.015,00 atau 43,71% dari keseluruhan anggaran Belanja Langsung (BL) dari 53 kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2014 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mengakselerasi pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Dari empat sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup berhasil meskipun belum semua indikator dapat dicapai dengan sangat memuaskan.

Pencapaian indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Capaian Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan  
RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2013-2018	Satuan	Realisasi		Rencana Capaian 2015
			2013	2014	
1	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	<i>persen</i>	15,83	17,02	19,64
2	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	<i>persen</i>	79,25	79,25	83,4

NO	SASARAN	INDIKATOR
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat
3	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi
4	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)

Prosentase penggunaan anggaran Tahun 2014, dari pagu anggaran sebesar Rp. 393.381.168.479,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 221.419.535.464,00 atau sebesar 56,29 %. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 171.961.633.015,00 atau 43,71% dari keseluruhan anggaran Belanja Langsung (BL) dari 53 kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2014 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mengakselerasi pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Dari empat sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan cukup berhasil meskipun belum semua indikator dapat dicapai dengan sangat memuaskan.

Pencapaian indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Capaian Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2013-2018	Satuan	Realisasi		Rencana Capaian 2015
			2013	2014	
1	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	<i>persen</i>	15,83	17,02	19,64
2	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	<i>persen</i>	79,25	79,25	83,4



No	Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2013-2018	Satuan	Realisasi		Rencana Capaian 2015
			2013	2014	
3	Tingkat Penurunan pelanggaran muatan lebih	unit	348.380	283.820	153.045
4	Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	persen	40	47,5	57,5
5	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru	persen	8,47	11,94	23,39
6	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan	persen	42,11	47,37	52,63
7	Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat	Km	1135,442	1135,442	1135,442

Namun berdasarkan review menpan Tahun 2014 terdapat beberapa perubahan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Indikator hasil review menpan ini secara keseluruhan capaian dapat dinyatakan berhasil secara memuaskan, hal itu dapat ditampilkan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3  
**KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014**  
**(Hasil Review Menpan)**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	33,33 %	33,33 %	100,00%
2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	0,22%	0,23%	104,55%
3	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	88 %	88 %	100%
4	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	76,00 %	76,32 %	100,42%
5	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	100,00 %	71,80 %	71,80%
6	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	17,00 %	17.02 %	100,12%
7	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	51,50 %	54.55 %	105,88 %
8	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	72,83 %	72.83 %	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
9	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	11,34 %	11,94 %	105,29 %

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2014, semua sasaran yang dirumuskan belum sepenuhnya dapat tercapai secara optimal. Hal ini diharapkan dapat mendorong seluruh komponen Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan memberikan landasan atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Sebagai gambaran, berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 berdasarkan sasaran dan indikator hasil review menpan tahun 2014.

#### A. Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan target serta realisasinya dapat dilihat dari 2 tipe yaitu

1. Sasaran dan capaian indikator sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran berdasarkan  
RPJMD dan Renstra Tahun 2013-2018

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2014	Realisasi 2014
1	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi dan pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas jalan	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	12,03-25,90	17,02
2	Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman;	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	79.25-83.40	79,25
3	Meningkatkan penanganan dan pengendalian muatan lebih (overloading)	Tingkat Penurunan pelanggaran muatan lebih	180.053	283.820

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2014	Realisasi 2014
4	a. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri; b. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.	Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	47,5-57,5	47,5
5	Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat, antara lain melalui dukungan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, Pangkalan Udara Citarate di Kabupaten Sukabumi, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di Cirebon, Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor, Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten Subang, Pangkalan Udara Cibeureum di Kabupaten Tasik, Pangkalan Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya, Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran; serta Bandara strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru	9.61-22	11,94
6	Terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut regional, antara lain melalui pembangunan Pelabuhan Laut Ciamaya di Kabupaten Karawang, pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai pintu gerbang ekspor dan perdagangan Jawa Barat Bagian Timur, pembangunan Pelabuhan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Jawa Barat, serta pengembangan pelabuhan laut regional Jawa Barat bagian Selatan, serta pelabuhan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan	45-56	47,37
7	terlaksananya pengembangan angkutan massal antara lain mewujudkan pembangunan shortcut Cibungur Tanjung Rasa monorel di Kawasan Metropolitan Bandung, mendorong pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung-Kertajati - Cirebon, pembangunan jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten, pembangunan jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang, reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon, Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang, pembangunan KRL (kereta listrik) pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka, elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek, pembangunan jalur ganda KA dan KRL jalur Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka, rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong, rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi), rel ganda KA Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea, mengembangkan jalur-jalur baru kereta api serta optimalisasi jalur yang telah ada, Reaktivasi jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi; pembangunan jalur kereta api khusus barang/ kargo; serta jalur KA dan sarana transportasi massal strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah	Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat	1135,442	1135,442



2. Sasaran dan capaian indikator sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan Hasil Review Menpan, dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.

**Sasaran dan Capaian Indikator Sasaran  
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Hasil Review Menpan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	33,33 %	33,33 %	100,00%
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	0,22%	0,23%	104,55%
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	88 %	88 %	100,00%
2.	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	76,00 %	76,32 %	100,42%
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	100,00 %	71,80 %	71,80%
3.	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	51,50 %	54.55 %	105,88 %
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	72,83 %	72.83 %	100,00 %
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	11,34 %	11,94 %	105,29 %
4.	Meningkatnya Ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di jalan provinsi	17,00 %	17.02 %	100,12%



B. Hasil kegiatan Tahun 2014

Hasil Kegiatan pada setiap program di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5  
Hasil Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
Tahun Anggaran 2014

No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
25	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	
01	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tersusunnya Renja SKPD/ Rancangan Renja; terselenggaranya Forum SKPD, Evaluasi dan monitoring kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
02	Verifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan	Laporan hasil verifikasi usulan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan, rekomendasi kepada TAPD Jawa Barat, laporan Monitoring
57	Penyusunan Rencana Kerja Bidang Transportasi Untuk Persiapan PON XIX	Ketersediaan dokumen perencanaan awal persiapan PON XIX Bidang Transportasi
41	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa	Pembebasan lahan Desa Wanakerta seluas 5.489 m <sup>2</sup> dan Sertifikasi Tanah, Proses Pengukuran oleh Pihak Perhutani, Pangulah Selatan Kab. Karawang sudah diserahkan sebanyak 27 Sertifikat, Sedangkan untuk lokasi di 4 Kec. Di Purwakarta (Karangmukti, Cikopo, Cibodas dan Cijunti) masih dalam proses BPN,
04	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas di ruas jalan Provinsi Jawa Barat yang terdapat masalah lalu lintas
05	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat	terlaksananya kajian penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Jawa Barat
06	Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya	terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi tahapan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya di Jawa Barat
07	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Waduk Cirata
08	Penyusunan Rencana Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	tersusunnya Dokumen Perencanaan Penataan Alur Pelayaran di Sungai Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Profil Alur Pelayaran, Draf kelas alur, pelayaran, Peta Alur Pelayaran dan Buku petunjuk pelayaran di Sungai
09	Penyusunan RTT Sisi Darat BIJB Kertajati Majalengka	terlaksananya penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Sisi Darat BIJB Kertajati Majalengka
10	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka Untuk Obligasi	tersusunnya Dokumen Integrasi Perencanaan untuk Kawasan Aerocity
11	Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat	surat rekomendasi pertimbangan teknis ketinggian tegakan (bangunan) pada wilayah KKOP bandar udara : 137 buah
12	Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka	Rapat-rapat pendukung percepatan pembangunan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, Dokumen Project Management Service (PMS) BIJB Kertajati, Dokumen Studi LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)



No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
13	Lanjutan Pembebasan Lahan BLJB Kertajati Jawa Barat	Pembebasan lahan di desa Sukakerta dan Sukamulya target 50 ha dan realisasinya 14,131 ha untuk menyelesaikan kebutuhan runway dan pembebasan tanah kas desa Kertajati dan Kertasari seluas 82,002 ha sehingga total lahan yang dibebaskan pada tahun 2014 seluas 96,133 ha serta total lahan yang dibebaskan sampai dengan tahun 2014 seluas 873,73 ha; pengukuran bidang tanah pengganti dan lanjutan pengukuran lahan sampai dengan 800 ha, Pengukuran bidang tanah untuk revisi pengukuran 1 keg, Kegiatan revisi, Sertifikasi desa Bantarjati 1 paket, dokumen Hasil tim verifikasi tanah pengganti tanah kas desa, Biaya pengukuran tanah pengganti desa Bantarjati, Kertasari, dan Kertajati kurang lebih 200 ha, terlaksanannya operasional pengukuran tanah seluas kurang lebih 800 ha dan tim pendamping
14	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat	Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Area Parkir dan Pos Pengawasan di Sukasari Waduk Jatiluhur, Pembangunan KM/WC Umum di Tanggul Usman Waduk Jatiluhur, Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Area Parkir dan Pos Pengawasan di Sukasari Waduk Jatiluhur dan Pembuatan Garasi Speed Boat di LLASD Jatiluhur
15	Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari	Dok Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari
16	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	terlaksanannya fasilitasi pembangunan dan reaktivasi perkeretaapian di Jawa Barat dengan tersusunnya dokumen kesepakatan
17	DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari (Tahap I)	Dokumen DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari (Tahap 1)
18	FS Terminal Terpadu di Jawa Barat	Tersusunnya kajian tentang FS. Terminal Terpadu di Jawa Barat
19	Penyusunan DED Gedung Display BLJB Kertajati	
54	Penyusunan DED Overlay dan Marking Runway Bandara Nusawiru untuk Persiapan PON XIX	Dokumen DED Overlay dan Marking Runway Bandara Nusawiru
55	Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru	terlaksanannya Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru seluas 33,664 m2, Belanja ATK, Dokumentasi dan cetak foto, honorarium panitia pengadaan tanah dan Honorarium panitia verifikasi serta biaya operasionalnya
42	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	
20	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	Terselenggaranya sosialisasi keselamatan sebanyak 2 kegiatan sosialisasi di Kota Cirebon dan Kota Bogor
21	Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat	Pengadaan Suku Cadang dan Alat Pendukung CCTV berupa Harddisk internal sata : 2 unit, Modem GSM : 2 unit, Board IP Camera : 2 unit , Battery Deep Cycle : 10 unit, Solar Charger : 5 unit, Penyusunan Data Base Fasilitas Kebutuhan Lalu Lintas di Jawa Barat berupa Buku dan SIM Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, Penyusunan Rencana Desain dan Lokasi Pemasangan PJU untuk mendukung PON XIX berupa Buku, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan kiaradua – Cikembar – Sukabumi – segaranten berupa Rambu LL uk 60 x 60 = 75 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Purwakarta – Wanayasa – Jalan Cagak – Cikaramas – Sumedang Rambu LL uk 60 x 60 = 75 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, APILL = 1 u, Pelican Crossing = 1, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Sadang – Subang – Cikamurang – Cijelag berupa Rambu LL uk 60 x 60, 30 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka =



No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
		<p>7.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pelican Crossing = 1, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Tanjungpura – Batujaya berupa Rambu LL uk 60 x 60 = 75 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Karangampel – Mundu – Tegalgubug – Prapatan – Rajagaluh Rambu LL uk 60 x 60 = 55 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 7.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Kadipaten – majalengka – Sumber – Cirebon Rambu LL uk 60 x 60 = 75 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, Pelican Crossing = 1, Pengadaan &amp; Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Bandung – Garut – Singaparna – Tasikmalaya berupa Rambu LL uk 60 x 60 = 30 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 7.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, APILL = 1 unit, Pelican Crossing = 1</p>
21	Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat	<p>Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Sumedang – Wado – Bantarujeg – Cikijing berupa Rambu LL uk 60 x 60 = 75 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Bandung – Majalaya – Cijapati berupa Rambu LL uk 60 x 60 = 50 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 7.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, Pelican Crossing = 1, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Karangnunggal – Tasikmalaya – Manonjaya – Cimaragas – Banjar berupa Rambu LL uk 60 x 60 = 50 Rambu LL uk 75x 75 = 4, Marka = 10.000 m, Patok tikungan = 20 u, Pagar pengaman = 20 u, Pengadaan dan Pemasangan RPPJ sebanyak 30 unit, Pengadaan Perlengkapan Fasilitas lalu Lintas Kerucut = 125, Rambu lalu Lintas portable = 50, RPPJ Portabel = 50, Water Barrier = 50, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di ruas jalan Selajambe – Cileungsi berupa Warning Light = 3 unit, Rambu Over Head = 3 unit, Marka = 1.650 m, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di ruas jalan Lebakjati – Rancakalong – Selawi berupa Pagar Pengaman = 28 unit, Rambu Over Head = 2 unit, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di ruas jalan Bandung Subang (Tanjakan Emen) berupa WL : 2 unit, Rambu OH : 2 buah, RPPJ 90cm x 150cm : 4 buah, Marka : 1.842 m, Mrk. Jalan Pita Penggaduh : 105 m, Rambu 60cm X 60cm : buah, Cermin Tikungan : 1 unit, Pengadaan &amp; Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan I sebanyak 35 unit, Pengadaan &amp; Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan II berupa 65 Unit, Pengadaan &amp; Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan III sebanyak 35 Unit, Pengadaan &amp; Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan IV Bagian Tengah 34 unit, Pengadaan &amp; Pemasangan PJU Solar Cell Wilayah Pembangunan IV Bagian Timur 20 unit, Pemeliharaan Rambu lalu Lintas Wilayah Pembangunan II berupa Daun Rambu kecil : 190 buah, Reflective Sheet Table Rambu : 50 buah, tiang : 210 buah, Pemeliharaan Rambu lalu Lintas Wilayah Pembangunan III &amp; IV berupa Daun Rambu kecil : 190 buah, Daun Rambu Peringatan : 2 buah, Reflective Sheet Table Rambu : 50 buah, tiang : 210 buah, Pemeliharaan LPJU Wilayah Pembangunan I &amp; II berupa Lampu : 21 unit, Stang : 1 set, Kabel : 110 m, Pemeliharaan LPJU Wilayah Pembangunan III berupa Solar Charger : 24 buah, Baterai : 48 buah, Cat Kotak Baterai : 24 buah, Gembok : 24 buah, Kawat Duri : 24 batang, Pemeliharaan LPJU Wilayah Pembangunan IV bagian Tengah berupa Lampu : 1 buah, Solar Charger : 3 buah, BCR : 22 buah, Baterai : 32 buah, Box Baterai : 1 buah, Kabel : 16 set, Pengamanan : 16 set, Pemeliharaan LPJU Wilayah Pembangunan IV bagian Timur berupa Baterai 65AH : 42 buah, Baterai 100AH : 6 buah, BCR : 8 buah, Hybrid Control + Driver : 4 buah, Kabel Twisted : 400 m, Kabel &amp; Accessories : 19 set, Pemeliharaan LPJU Sekitar Bandara Nusawiru</p>



No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
		berupa Kabel Twisted : 8.000 m, Stopping Buckle : 150 buah, Link : 300 buah, Tap Connector : 300 buah, Stainless Steel : 4 roll, Wide Clamp : 300 buah, Box APP : 10 set, Kontaktor : 10 buah, MCB : 10 buah, Time Switch : 10 buah, Ballas : 117 buah, Lampu : 117 buah, Ignitor : 117 buah, Capacitor 20 Mfd : 117 tiang, APILL, Kab. Ciamis & Kota Cirebon sebanyak Traffic Light : 2 unit. 8 jembatan Timbang, kota Tasikmalaya / Kab. Tasikmalaya sebanyak WL: 10 unit
22	Pendamping Untuk Kegiatan DAK Fasilitas Lalu Lintas	pengadaan Marka sepanjang 2.500 m', Rambu sebanyak 40 buah ruas jalan Jonggol – Cileungsi dan marka 3.000, Rambu 16 buah pada ruas Tasikmalaya – Manonjaya
23	Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	meningkatnya fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa Barat yang berdampak pada peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui terpasangnya : Marka Jalan 27.834 M, Rambu 100 Unit pada ruas jalan Ciamis – Cikijing – Kuningan – Cirebon, terpasangnya Marka 9.398 M, Rambu 100 Unit pada ruas Jalan Bekasi – Narogong – Cileungsi dan terpasangnya Warning Light 8 unit pada ruas jalan sadang – Bandung dan Subang – Purwakarta
43	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	
24	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba Tertib Lalu Lintas	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan pada 26 Kabupaten/kota, lomba tertib lalu lintas sebagai dasar ikut serta pada lomba WTN (Wahana tata Nugraha) pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas sebagai dasar ikut serta pada Lomba WTN (Wahana Tata Nugraha), penghargaan yang diperoleh Jawa Barat dari keikut sertaan Lomba Tertib Lalu Lintas yang dilaksanakan secara rutin oleh Kementerian : Penghargaan Piala WTN Sempurna (mendapat 2 penghargaan yaitu WTN kategori Lalu Lintas dan Kategori Angkutan) Kota Bandung, Penghargaan Piala WTN Kategori Lalu Lintas : Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis, serta Penghargaan Piala WTN Kategori Angkutan diperoleh oleh Kota Bogor
25	Evaluasi Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat	adanya dokumen evaluasi tingkat pelayanan angkutan penumpang umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat
26	Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Provinsi di Perkotaan	Tersedianya dokumen evaluasi tingkat pelayanan jalan di perkotaan
27	Operasional Bus Sekolah	Tersedianya kendaraan bus sekolah untuk pelayanan anak sekolah di 4 lokasi.
44	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	
28	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru	terselenggaranya poskoda Dishub Provinsi Jawa Barat, Poskotis, pasar Tumpah 40 Lokasi, pencacahan arus 40 Lokasi, sewa bus 1 kegiatan, traffic cone 400 Buah dan Rompi 100 buah.
29	Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan	OPGAB dapat dilaksanakan sebanyak 31 kali.
30	Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong	Terlaksananya pemasangan E-enforcement di JT Gentong.
31	Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat	terlaksananya pembinaan operasional angkutan penumpang umum di Jawa Barat (Regulator dan Operator) dan tersusunya Integrasi Software Data Base Angkutan Penumpang Umum dalam 1 (satu) Operation System.
56	Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Timbang Cipeuyeum Jalur Cianjur-Sukabumi	terlaksananya Pematangan Lahan Cipeuyeum, Untuk Pembangunan Jembatan Timbang Jalur Cianjur – Sukabumi di JL.Cirancang – Rajamandala Kelurahan Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Seluas :25.250 M2 1 Kegiatan Pematangan Lahan.



No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
45	<b>Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor</b>	
32	Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor melalui : Penyuluhan kepada perusahaan karoseri se-Jawa Barat, Rapat koordinasi dengan penguji kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan se- Jawa Barat, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh DI Kab/Kota se-Jawa Barat, Terselenggaranya rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota se Jawa Barat, terlaksananya supervisi dan koordinasi ke UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kab/Kota se Jawa Barat
33	Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	terlaksananya audit eksternal dan registrasi sertifikasi ISO 9001-2008.
50	<b>Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah</b>	
34	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
52	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
35	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Kerohanian 12 bulan, Kesenian 12 bulan, Dokter Perawat 12 bulan, Penanaman sikap mental, disiplin dan jiwa korsa ESQ/Outbond, Penanggulangan Hama Tikus, Sarana dan prasarana olah raga , Belanja Bahan Pakaian PDH 370 stel, Belanja Pakaian Olah raga 370 stel , Diklat Teknis / Fungsional / Bimtek/Seminar/Sosialisasi 12 bulan dan Kontribusi Pelatihan 12 bulan.
53	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
36	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	tersedianya Peralatan kantor yang memadai melalui :Belanja Alat Tulis Kantor (12 bulan), Belanja Alat Listrik dan Elektronik (12 bulan), Pengadaan Jasa Kantor : Telepon (12 bulan), Air (12 bulan), Listrik (12 bulan), Surat Kabar (12 bulan), Internet (12 bulan), Dokumen dan Publikasi (12 bulan), Pajak Bumi dan Bangunan (1 Tahun), Belanja Cetak (12 bulan), Belanja Penggandaan (12 bulan), Belanja Sewa Gedung (2 Paket),- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (12 bulan), Penambahan Daya dan Jaringan Listrik (1 Paket), Belanja Air Minum (Mineral Galon) (12 Bulan), Perjalanan Dinas (12 Bulan).
37	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	terpenuhinya kebutuhan dasar Operasional Unit Kerja SKPD UPTD LLAJ Wilayah I Bogor – Purwakarta dalam Mendukung Tugas Kegiatan Adalah Belanja Alat Tulis Kantor 4 Kali, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4 Kali, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Kali, Belanja Surat Kabar 12 Bulan, Belanja Cetak 4 Kali, Belanja Penggandaan 25.000 Lembar, Belanja Penjilidan 10 Bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan, Belanja Perjalanan Dinas 1 Kegiatan, Belanja Jasa Listrik 12 Bulan, Belanja Jasa Internet 12 Bulan, Belanja Jasa Air 12 Bulan, Belanja Jasa Telepon 12 Bulan
38	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat	Pengadaan ATK, Peralatan Kebersihan, Materai/perangko, Listrik , Surat Kabar, Belanja Cetak, Foto Copy, Mamin Rapat, Perjalanan Dinas serta Honorarium Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan.
39	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	Belanja ATK, Belanja Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Surat Kabar, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Pajak, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan/Foto Copy, Belanja Makanan dan Minuman, Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi, Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi, Belanja Telepon dan Fax, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Internet



No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
40	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon-Priangan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon – Priangan dalam mendukung Tugas, Belanja ATK 4 Kali, Belanja Perangko, Materai dan benda Pos 12 Bulan, Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 4 Kali, Belanja Jasa Telepon 12 Bulan, Belanja Jasa Air 12 Bulan, Belanja Jasa Listrik 12 Bulan, Belanja Surat Kabar 12 Bulan, Belanja Jasa Internet 12 Bulan, Belanja Cetak 3 Kegiatan, Belanja Photo Copy 96.000 Lembar, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480 Box, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 735 Hok.
54	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
41	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	tersedianya sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, Lemari Pakaian (2 set), Pengadaan Mic Conference (1 set), Pengadaan Meja dan Kursi rapat (1Set), Tempat tidur susun (2 set), Kursi tamu (1 set), Pengadaan Karpet Aula (1 set), Pengadaan Televisi (1 unit), Pengadaan Gordyn (1 set), Pengadaan AC (3 unit), Pengadaan Water Boiler (1 unit), Pengadaan Megatron (1 paket), Perlengkapan olahraga bulutangkis (Karpet, net dan lain-lain), Pemasangan megatron (1 unit), Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung baru ( 1 paket), Pengadaan dan pemasangan torn dan rangka (1 paket), Pengadaan komputer (10 unit), Pengadaan printer (10 unit), Pengadaan dan pemasangan water heater solar cell (2 unit), Pengadaan karpet dan gordyn di ruangan kepala dinas (1paket), Pengadaan filling kabinet dan lemari besi (1 paket), Pengadaan dan pemasangan AC (10 unit),Pengadaan leveling nat dan corryng case (1 set), Scanner A3 (1 unit) dan Scapholding (1 set).
42	Revitalisasi Tahap II UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan dan Instalasi Jembatan Timbang	terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
43	Revitalisasi Tahap II UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta dan Instalasi Jembatan Timbang	Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Belanja Jasa Konsultasi 2 Paket, Belanja Penambahan Daya Kantor UPTD LLAJ Wilayah I 1 Paket, Belanja Restorasi Pagar Balonggandu 1 Paket, Belanja Pematangan Lahan di Cipeuyeum 1 Kegiatan, Pembuatan Talud Lahan di Sukaraja 1 Kegiatan, Belanja Pengurugan Lahan di Sukaraja 1 Kegiatan, Belanja Pengurugan Lahan di JT.Balonggandu 1 Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Dongkrak 3 Unit, Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 3 Unit, Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 5 Unit, Belanja Modal Pengadaan Brankas 1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Genset 1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 5 Unit, Belanja Modal Pengadaan Printer 5 Unit, Belanja Modal Pengadaan Karpet Mushola JT.Balonggandu 1 Paket, Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital 1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Mic Conference Aula JT.Balonggandu 1 Set, Belanja Pembangunan Mushola JT.Balonggandu 1 Kegiatan
44	Revitalisasi Tahap II Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru	Belanja ATK, Perjalanan Dinas, Pengadaan AC Split 1 PK 2unit, Pengadaan Komputer PC 3 unit, Pengadaan Notebook 3 unit, Pengadaan Meja dan kursi kerja 15 unit, Pengadaan meja kursi Tamu 2 unit, Pengadaan infocus 2 unit, Pemb. Pagar rumah dinas di bandara nusawiru 150m, Pengadaan gawang detector 1 unit, Pengadaan PC 3 unit, Pengadaan Printer 2 unit, Pemasangan Jaringan Internet, Pengadaan kursi stenless empat duduk 15 unit, Pengadaan radio komunikasi VHF/AG 1 unit, Peningkatan JL lingkungan 1.125 m2, Rehab gd terminal b. nusawiru, pemb. Gd VIP 72 m2, Rehab rumah dinas t 36 3 unit, Pembuatan skat gd terminal dan pengecatan gd terminal, rehab rumah dinas Type 36 (mess) dan gd PK-PPK, Pemb pagar rumah dinas di bandara Nusawiru

No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
45	Proses sertifikasi tanah bandara Nusawiru serta tanah pengganti (Tanah kas desa) kabupaten Pangandaran	Belanja ATK, Materai, Cetak photo album photo, belanja sertifikasi pengukuran tanah, biaya operasional petugas pengadaan tanah pengadaan photo copy, penjilidan, mamlin rapat, perjalanan dinas dan belanja jasa konsultansi
46	Revitalisasi Tahap II Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP dan Instalasi Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	renovasi Gedung Eks PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) menjadi Gedung Pertemuan Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP, Rehabilitasi Rumah Dinas di Pelabuhan Penyeberangan Masingklak, Rehabilitasi Kantor Pelabuhan Penyeberangan Masingklak, Perbaikan, jembatan Bongkar Muat, Pengadaan Senter Flashlight Waterproof, Pengadaan Ac Split 1 PK, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Sel, Pembuatan Garasi Speed Boat, Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Penyeberangan Muara Gembong Menjadi Mess Karyawan, Pengadaan Almari Besi, Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro, Pengadaan Kursi Kerja, Pengadaan Tempat Tidur, Pengadaan Sofa, Rehabilitasi Gedung Kantor di Cililin Saguling, Pengadaan Sound System Pengeras Suara di Waduk Cirata, Pembangunan Gudang Penyimpanan di Jangari Waduk Cirata, Pengadaan Almari Pakailan, Pembangunan Mess Karyawan di Tanggul Usman Waduk Jatiluhur, Pembangunan Gudang Penyimpanan di Tanggul Usman Waduk Jatiluhur
55	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	
47	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat	Belanja alat listrik, BBM, Pengisian Tabung, Jasa Service, Pelunasan Kendaraan Operasional, Belanja STNK, Pemeliharaan Komputer, Printer, Pembersihan Lingkungan Bandara, Pembersihan Sampah, Perbaikan Antene, Jalur Telepon, Perbaikan Horn Tower, Fuse Lampu flood Light, Jaringan Telpon Kabel FABX dan Penggantian Kantong Angin.
48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 (satu) tahun anggaran 2014 terdiri dari : Upah tenaga kebersihan Kantor Balai dan Pos Pengawasan, Upah tenaga keamanan Kantor Balai, Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan, belanja bahan Bakar Minyak Kendaraan, Belanja Jasa STNK, Belanja Jasa Service, Belanja Pelumas, Pemeliharaan alat kantor, Pemeliharaan Mesin Potong Rumput dan Pemeliharaan Pompa Air.
49	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Sumber daya Manusia, Dana Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 Bulan, Belanja Bahan Bakar Minyak 1500 Liter/bulan, Belanja Jasa Kebersihan 1 Tahun, Belanja Jasa Keamanan 1 Tahun, Belanja STNK 7 Unit/tahun, Belanja Service 7 Unit/tahun, Belanja Pelumas 7 Unit/tahun, Belanja Perawatan Berkala Alat Timbang Digital JT.Kemang 1 Tahun Belanja Perawatan Berkala Alat Timbang Digital JT.Balonggandu 1 Tahun, Belanja Perawatan Berkala Alat Timbang Digital JT.Cibaragalan 1 Tahun, Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 47 Unit, Belanja Pemeliharaan Radio Komunikasi 1 Tahun, Belanja Pemeliharaan Jalan JT.Kemang 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Internet UPTD LLAJ Wilayah I 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor UPTD LLAJ Wilayah I 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman JT.Kemang 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman JT.Bojong 1 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan Taman dan Halaman JT.Balonggandu 1 Kegiatan, Belanja pemeliharaan Taman dan Halaman JT.Purwakarta 1 Kegiatan.



No	Program/Kegiatan	Hasil Kegiatan
50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun, Belanja Jasa Kebersihan 1 Tahun, Belanja Jasa Keamanan 1 Tahun, Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4 kali, Belanja Penggantian Pecah Belah 4 Kali, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8 Unit, Belanja Service Kendaraan Dinas 12 Bulan, Belanja Pelumas Kendaraan Dinas 12 Bulan, Belanja Pemeliharaan peralatan/Perlengkapan Kantor 4 Kali, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3 Kegiatan, Belanja Pemeliharaan 4 Jembatan Timbang 4 Kegiatan
51	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat 1 (satu) tahun anggaran 2014 melalui kegiatan : Belanja : Peralatan dan Bahan Kebersihan (2 paket), Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Dinas (1 paket), Perawatan Kendaraan Bermotor (1 Tahun) 2. Pemeliharaan : Jaringan Listrik, Telepon, Air, Internet (1 Tahun), Alat komunikasi (1 paket), Perlengkapan/Peralatan Kantor (1 paket), eks Kantor Gedung Pengujian (1 paket), Penataan Halaman Depan Kantor Dinas (1 paket), Pagar Kantor Dinas (1 paket), Tangga Kantor Dinas (1 paket), Lantai Eks Gedung Pengujian (1 paket), 3. Pemasangan : Kanopi Bidang Transportasi Udara dan Perpustakaan (1 paket), Kanopi Garasi Kendaraan Operasional Dinas (1 paket), Penataan taman kantor dinas (1 paket), Pelitur dan Wallpaper, Pemeliharaan Canopy Garasi Kendaraan Roda 2 dan Garasi Kendaraan Kepala Dinas, Pembongkaran dan Pemasangan Smoking Area serta Besi Pembatas Parkir. Pemeliharaan Selasar dan Tangga Kantor Dinas, Pemeliharaan Taman Dalam Kantor Dinas, Pemeliharaan Lahan Parkir Dinas (Pengaspalan), Pemeliharaan Gedung Olah Raga, Stiker Kendaraan Operasional Dinas, dan instalasi Jaringan Listrik dan Gambar
59	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
52	Pengembangkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	tersusunnya dokumen perencanaan dan program, evaluasi kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, berupa : Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Tersusunnya Bahan LKPJ, LAKIP, LPPD dari Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat, Tersusunnya Laporan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan, Kegiatan Penatausahaan Keuangan : Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulanan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan
67	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	
53	Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan Website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat



### **C. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2014 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.**

##### **a) Permasalahan**

- 1) *Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah*, alokasi anggaran untuk evaluasi dan monitoring ke lokasi kegiatan, teralokasi setelah perubahan dengan menggeser dari efisiensi/sisa forum SKPD, sehingga pelaksanaan monitoring ke lokasi kegiatan hanya dilaksanakan pada Triwulan IV
- 2) *Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan*, Kegiatan ini tidak dapat diprediksi tingkat pelaksanaannya, karena hanya merupakan penyediaan, kegiatan yang disetujui/telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan tidak diketahui dengan tepat dan akurat, sehingga untuk melakukan monitoring dan evaluasi hanya berdasarkan list/data dari Biro Keuangan serta informasi dari Kabupaten/Kota
- 3) *Kegiatan Penyusunan Rencana Bidang Transportasi Untuk Persiapan PON XIX*, Paket kegiatan Pembuatan Rencana Awal Buku Panduan Transportasi PON XIX tidak dapat dilaksanakan karena belum ada data dari bidang/instansi lain yang terkait dan Paket kegiatan Jasa Konsultasi Pembuatan Buku Panduan Transportasi PON XIX tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk dilaksanakan pada TA. 2014.

##### **b) Solusi**

- 1) Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, akan Diusulkan pada tahun 2015
- 2) Kegiatan Verifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan, perlu ditingkatkan koordinasi antar pihak, diusulkan/dikoordinasikan agar OPD terkait dapat menerima informasi secara serempak terkait alokasi anggaran bantuan keuangan sesuai bidangnya, alokasi anggaran hibah atau Bansos sesuai bidangnya yang harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi.

- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Bidang Transportasi Untuk Persiapan PON XIX diusulkan kembali pada TA 2015/2016 dan untuk Paket kegiatan Jasa Konsultasi Pembuatan Buku Panduan Transportasi PON XIX diusulkan kembali pada TA 2015

## **2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

### **a. Permasalahan**

- 1) Dalam kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa untuk Kompensasi lahan kehutanan seluas 7,28 Ha Belum dapat dilaksanakan, karena :
  - pengadaan lahan pengganti kehutanan dalam pelaksanaannya terdapat banyak penafsiran, sehingga harus dilakukan koordinasi, konsultasi dan pendapat hukum dari Instansi terkait ;
  - Persetujuan Kementerian Kehutanan untuk tanah pengganti terbit pada tanggal 24 Juli 2014, dan Penetapan Lokasi terbit pada tanggal 19 Desember 2014 sehingga berdampak pada jadwal pengadaan lahan;
  - Sesuai surat dari P2T Kabupaten Purwakarta bahwa secara proses dan karena sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi, maka untuk proses selanjutnya tidak dapat dilaksanakan sampai ke proses pembayaran.
- 2) Kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Pelaksanaan kegiatan andal lalin baru dimulai setelah terbit Kepgub ttg tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas pada bulan Juli 2014, dan berdasarkan permohonan yang diajukan. Anggaran untuk kegiatan Forum LLAJ tidak seluruhnya digunakan karena diakomodir oleh kegiatan koordinasi pada kegiatan lainnya.
- 3) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya, Kegiatan ini tidak terserap 100% baik fisik maupun keuangan, hal ini disebabkan menunggu hasil kajian pipa bawah air dan alur pelayaran yang kajiannya dilakukan oleh (Tim Konsultan Independen dari Kemenko Perekonomian).

- 4) Dalam kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka Untuk Obligasi, Permasalahan pada Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka Untuk Obligasi adalah Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Untuk Obligasi tidak dilaksanakan karena sudah dilaksanakan oleh Asian Development Bank (ADB), Penyusunan Pengkajian Pembangunan Kawasan Aerocity tidak dilaksanakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi, Fasilitas dan Pemantauan Lingkungan BIJB Kertajati tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tersedia tidak mencukupi.
- 5) Dalam kegiatan Fasilitas dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka Anggaran Pelaksanaan Ground Breaking BIJB Kertajati pada Kegiatan Fasilitas dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan masih menunggu ditetapkannya hasil-hasil review dokumen perencanaan dan diselesaikannya Rencana Teknik Terinci (RTT) Sisi Darat yang dilaksanakan pada tahun 2014.
- 6) Dalam kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat adalah terdapat rencana pembiayaan untuk tahapan pembebasan lahan Desa Wanakerta Kabupaten Purwakarta untuk jalur kereta api Cibungur – Tanjunggrasa sampai dengan proses konsinyasi berupa honor-honor PNS Non Provinsi, karena masyarakat pemilik tanah Desa Wanakerta menyetujui dibayar sesuai harga hasil penilaian appraisal, maka pembiayaan yang tersedia pada kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat berupa honor-honor PNS Non Provinsi tidak direalisasikan.
- 7) Dalam kegiatan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat adalah di area yang telah direncanakan untuk Runway (Desa Sukamulya dan Sukakerta) yang akan dibebaskan pada Tahun 2014 untuk kebutuhan runway sampai dengan 4.000 M, terdapat warga yang melakukan penolakan, khususnya masyarakat Desa Sukamulya, penolakan yang dilakukan cenderung anarkis dan melibatkan masa dalam jumlah besar, sehingga Badan Pertanahan

Nasional (BPN) kesulitan untuk dapat masuk melaksanakan pengukuran dan sehingga proses-proses lainnya berjalan lambat

**b. Solusi**

- 1) Dalam kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa tahapan proses terus dilakukan dan untuk pembayaran diusulkan pada perubahan tahun anggaran 2015.
- 2) Forum LLAJ pada kegiatan Kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas akan dianggarkan pada TA. 2015
- 3) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya, Sampai saat ini masih menunggu hasil kajian tersebut;
- 4) Dalam kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka Untuk Obligasi adalah Fasilitas dan Pemantauan Lingkungan BIJB Kertajati diusulkan lagi pada DPA tahun anggaran 2015 dengan kegiatan tersendiri;
- 5) Dalam kegiatan Fasilitas dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka Anggaran Pelaksanaan Ground Breaking BIJB Kertajati pada Kegiatan Fasilitas dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan masih menunggu ditetapkannya hasil-hasil review dokumen perencanaan dan diselesaikannya Rencana Teknik Terinci (RTT) Sisi Darat yang dilaksanakan pada tahun 2014;
- 6) Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat dialokasikan kembali pada tahun 2015;
- 7) Dalam Kegiatan Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat:
  - Untuk warga Desa Sukamulya dapat dilakukan pembebasan lahan bertahap dan bersifat personal/persial terhadap warga yang bersedia dibebaskan;
  - Diupayakan secara terus menerus berkoordinasi dengan Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;